

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor perbankan di Indonesia telah berkembang pesat. Hal tersebut didorong oleh kebutuhan masyarakat akan modal untuk perdagangan, investasi, dan pengelolaan aset, serta penyesuaian infrastruktur perbankan yang meningkatkan kualitas layanan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), bank berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyalurannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, sistem perbankan terbagi menjadi dua kategori, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan sistem konvensional, bank ini terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 1 ayat 1, perbankan syariah seluruh aspek yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk struktur kelembagaan, aktivitas bisnis, serta mekanisme dan prosedur dalam menjalankan kegiatannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Juliani Wulandari et al., "Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 165–166.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah".

Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum memiliki fungsi untuk memberikan layanan jasa dalam aktivitas pembayaran. Sebaliknya, BPRS fokus pada kegiatan usaha syariah tanpa menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank konvensional yang ingin menerapkan sistem syariah diwajibkan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai entitas khusus yang beroperasi sesuai prinsip syariah.<sup>3</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat, khususnya di sektor mikro dan kecil. Sebagai bagian dari sistem perbankan syariah, BPRS berfungsi sebagai agen pembangunan (*development agent*) yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Kegiatan usaha BPRS mencakup penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti deposito atau tabungan, serta menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah, melalui akad seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), atau *musyarakah* (kerjasama). Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, baik individu maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS mencakup berbagai sektor, seperti pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan pembiayaan investasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Irhamsyah Putra, "Jurnal ekonomi rabbani," *AL qard dalam prespektif al qur'an dan hadits serta hubungannya dengan riba* 2, no. 1 (2022): 146.

<sup>4</sup> Eka Budiyantri, "Peran Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perekonomian Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan publik* 23, no. 2 (2018): 144

Dengan fokus pada masyarakat pedesaan dan pelaku UMKM, BPRS menjadi sarana penting untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus menjaga prinsip-prinsip keuangan syariah dalam operasionalnya. Berikut ini merupakan data perkembangan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan jumlah bank:

**Tabel 1. 1 Perkembangan BPRS Berdasarkan Jumlah Bank**

<b>Tahun</b>	<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>	<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>	<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)</b>
2020	14	20	163
2021	12	21	164
2022	13	20	167
2023	14	19	173
2024	14	19	173

(Sumber: ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa pertumbuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Tahun 2024 jumlah BPRS mengalami puncak tertinggi, yaitu sebanyak 173 bank. Pertumbuhan BPRS yang signifikan ini mencerminkan perkembangan pesat di sektor perbankan syariah pada tingkat mikro. Berikut ini akan dijabarkan distribusi total BPRS di setiap pulau di Indonesia.

**Tabel 1. 2 Distribusi Total BPRS di Setiap Pulau**

<b>No</b>	<b>Pulau</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pulau Jawa	106
2	Pulau Sumatera	50
3	Pulau Sulawesi	9
4	Pulau Kalimantan	2
5	Pulau Maluku	3
6	Pulau Papua	1
7	Pulau Bali	1
8	Pulau Nusa Tenggara	1
<b>TOTAL</b>		<b>173</b>

(Sumber: ojk.go.id)

Tabel 1.2 menunjukkan data persebaran jumlah BPRS di setiap pulau, Pulau Jawa mendominasi dengan 106 BPRS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera sebanyak 50 BPRS dan Sulawesi sebanyak 9 BPRS. Sementara itu, Pulau Kalimantan, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki jumlah BPRS yang relatif sedikit, masing-masing di bawah 5 BPRS. Banyaknya BPRS di Pulau Jawa mencerminkan posisinya sebagai pusat aktivitas keuangan syariah, didukung oleh populasi besar, aktivitas ekonomi yang tinggi, potensi pasar luas, dan infrastruktur keuangan yang lebih maju.

**Tabel 1. 3 Distribusi BPRS di Pulau Jawa**

No.	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Timur	34
2	Jawa Barat	21
3	Jawa Tengah	27
4	Banten	9
5	D.I. Yogyakarta	13
6	DKI Jakarta	2
<b>TOTAL</b>		<b>106</b>

(Sumber: ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.3, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah BPRS terbanyak dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 34 BPRS. Jawa Timur merupakan provinsi terbesar di Pulau Jawa dengan luas wilayah mencapai 47.922 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Jawa, yang umumnya berbicara bahasa Jawa, meskipun sebagian juga menggunakan bahasa Madura.<sup>5</sup>

Jawa Timur terdiri dari 10 wilayah budaya yang mencerminkan keberagaman adat dan tradisi masyarakatnya. Secara umum, terdapat 4 praktik budaya utama, yaitu Mataraman, Arek, Pandalungan, dan Pulau Madura.

<sup>5</sup> A.Jauhar Fuad, "Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman," *Tlatah dan Tradisi* 30, no. 1 (2019): 2.

Selain itu, terdapat budaya skala kecil seperti Osing, Tengger, Jawa Panoragan, Madura Kangean, Madura Bawean, dan Samin.

Tlatah Mataraman merupakan kawasan yang masih memiliki keterikatan erat dengan budaya serta tradisi peninggalan Kerajaan Mataram yang berpusat di Yogyakarta dan Surakarta. Kawasan ini mencakup bagian barat Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, serta Kabupaten Bojonegoro.<sup>6</sup>

Tlatah Arek mencakup wilayah tengah Provinsi Jawa Timur, terutama di sekitar Surabaya dan daerah sekitarnya. Daerah ini dikenal dengan masyarakatnya yang energik serta memiliki semangat juang yang tinggi. Cakupan wilayahnya meliputi Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, serta Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah dialek Arek, yang menjadi ciri khas masyarakat di bagian timur Pulau Jawa.

Tlatah Madura Pulau meliputi keseluruhan wilayah Pulau Madura beserta daerah sekitarnya. Wilayah ini terdiri atas Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Budaya Madura yang melekat di tlatah ini sangat khas, ditandai dengan tradisi yang kuat, penggunaan bahasa Madura.

Tlatah Pandalungan terletak di bagian selatan hingga tenggara Jawa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 3

Timur. Karakter budaya masyarakat di kawasan ini merupakan hasil perpaduan antara tradisi Jawa dan Madura. Wilayah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, hingga Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Pandalungan dikenal memiliki kebudayaan yang beragam dan unik, serta menggunakan bahasa khas Pandalungan yang memadukan unsur dialek Jawa dan Madura.

Pembagian wilayah budaya ini bukan untuk membedakan masyarakat Jawa Timur, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap komunitas memiliki identitas budaya dan kearifan lokal yang khas.<sup>7</sup> Meskipun terdapat perbedaan dalam karakteristik sosial dan budaya, Jawa Timur tetap bersatu sebagai satu provinsi yang harmonis. Keberagaman ini juga berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi di setiap wilayah, termasuk dalam distribusi lembaga keuangan seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

**Tabel 1. 4 Distribusi BPRS Berdasarkan Tlatah di Jawa Timur**

<b>Tlatah</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Nama BPRS</b>
<b>Tlatah Mataraman</b>	Kab. Kediri	BPRS Artha Pamenang
		BPRS Rahma Syariah
	Kota Kediri	BPRS Tanmiya Artha
	Kab. Ponorogo	BPRS Al Mabruur Babadan
		BPRS Mitra Mentari Sejahtera
	Kab. Lamongan	BPRS Madinah
	Kab. Magetan	BPRS Magetan (Perseroda)
Kab. Ngawi	BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda)	
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>
<b>Tlatah Arek</b>	Kab. Gresik	BPRS Amanah Sejahtera
		BPRS Mandiri Mitra Sukses
	Kab. Sidoarjo	BPRS Baktimakmur Indah

<sup>7</sup> Ayu Sutarto dan Setya Yuwana Sudikan, *Pemetaan Kebudayaan Di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif* (Jember: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kompyawisda Jatim, 2008).

<b>Tlatah</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Nama BPRS</b>
		BPRS Annisa Mukti
		BPRS Unawi Barokah
	Kab. Jombang	BPRS Lantabur Tebuireng
	Kab. Malang	BPRS Bhakti Haji
		BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
		BPRS Al Hijrah Thayibah
	Kota Batu	BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah
		BPRS Bumi Rinjani
	Kota Mojokerto	BPRS Mojo Artho Mojokerto Perseroda
	Kota Malang	BPRS Bumi Rinjani Malang
		BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
	Kota Surabaya	BPRS Karya Mugi Sentosa
		BPRS Jabal Nur Tebuireng
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>
<b>Tlatah Pandalungan</b>	Kab. Jember	BPRS Asri Madani Nusantara
	Kab Pasuruan	BPRS Daya Artha Mentari
		BPRS Al Hidayah
		BPRS Ummu
		BPRS Jabal Tsur
	Kab. Probolinggo	BPRS Bumi Rinjani Probolinggo
Kab. Situbondo	BPRS Situbondo	
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>
<b>Tlatah Madura</b>	Kab. Sampang	BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang Perseroda
	Kab. Pamekasan	BPRS Sarana Prima Mandiri
	Kab. Sumenep	BPRS Bhakti Sumekar Perseroda
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

(Sumber: ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.4 yang menunjukkan data persebaran BPRS di Jawa Timur, Tlatah Arek memiliki jumlah terbanyak, yaitu 16 BPRS. Wilayah ini mencakup pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama di Jawa Timur, sehingga mendukung berkembangnya berbagai layanan keuangan syariah. Jumlah yang lebih tinggi di Tlatah Arek mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah. Keberadaan kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang di Tlatah Arek berkontribusi pada meningkatnya

permintaan atas layanan keuangan, termasuk sektor syariah, untuk mendukung aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menunjukkan bahwa Tlatah Arek memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan jaringan BPRS.

BPRS Tlatah Arek Jawa Timur turut aktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif. Sebagai lembaga keuangan syariah, penyaluran pembiayaan menjadi salah satu indikator utama kinerja dan peran intermediasi bank. Berdasarkan laporan keuangan, total pembiayaan dan aset BPRS Tlatah Arek menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas operasional serta kemampuan bank dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Rincian perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5 Perkembangan Pembiayaan dan Aset BPRS Tlatah Arek Jawa Timur**

PERIODE		PEMBIAYAAN	ASET
2022	Triwulan III	Rp632.180.428,00	Rp887.336.015,00
	Triwulan IV	Rp638.974.902,00	Rp927.066.049,00
2023	Triwulan I	Rp658.763.153,00	Rp937.712.872,00
	Triwulan II	Rp674.205.606,00	Rp874.062.989,00
	Triwulan III	Rp691.778.445,00	Rp933.457.452,00
	Triwulan IV	Rp773.416.370,00	Rp976.420.968,00

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Tlatah Arek Jawa Timur (data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 1.5, terlihat bahwa total pembiayaan BPRS Tlatah Arek Jawa Timur mengalami peningkatan dari Rp 632.180.428 pada triwulan III tahun 2022 menjadi Rp 773.416.370 pada triwulan IV tahun 2023. Kenaikan pembiayaan ini diikuti pula dengan peningkatan total aset dari Rp 887.336.015 menjadi Rp 976.420.968 pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ekspansi kegiatan intermediasi bank, dimana peningkatan pembiayaan

menggambarkan upaya BPRS dalam memperluas jangkauan penyaluran dana kepada masyarakat.

Dalam sistem perekonomian suatu negara, perbankan syariah memainkan peran yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, memastikan tingkat kesehatan bank tetap terjaga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Regulasi yang diterapkan bertujuan untuk memperkuat tata kelola perbankan, dengan menegaskan bahwa bank yang sehat harus beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian terhadap kondisi suatu bank umumnya dilakukan melalui analisis laporan keuangan, yang mencakup komponen seperti neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan perbankan adalah dengan menganalisis rasio keuangan, termasuk rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas.<sup>8</sup>

Rasio profitabilitas yang menjadi fokus utama penelitian ini, berfungsi sebagai indikator untuk sejauh mana suatu perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini sangat penting bagi pemegang saham untuk menilai potensi pendapatan di masa depan dan menarik minat investor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan yang sehat, yang dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor untuk menanamkan modalnya.<sup>9</sup> Amar juga menegaskan bahwa profitabilitas adalah indikator efektivitas pengelolaan keuangan yang baik, yang relevan untuk menarik perhatian pemegang saham.<sup>10</sup>

---

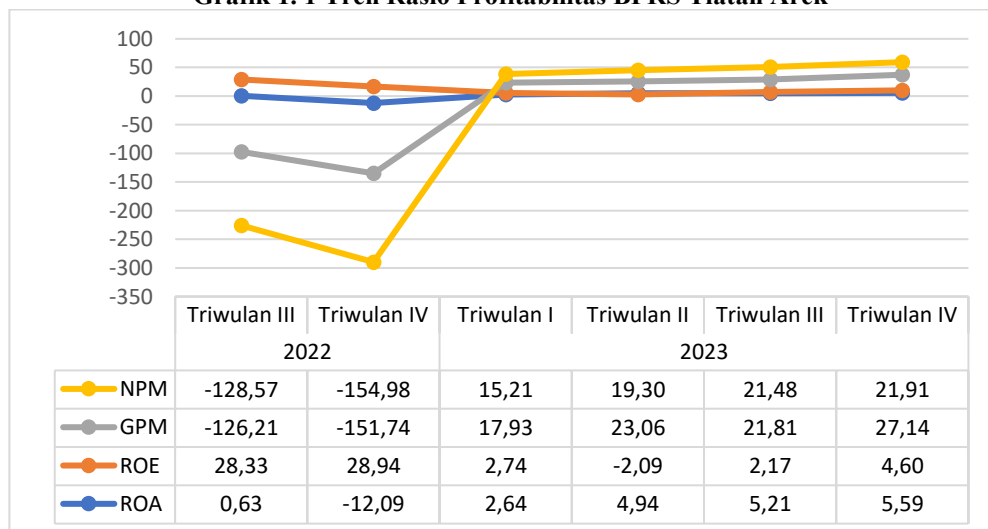
<sup>8</sup> Bella Giovana Putri dan Siti Munfaqiroh, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan," *Inspirasi ; Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 17, no. 1 (2020): 215.

<sup>9</sup> Lailatus Sa'adah, "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan PT Bank Central Asia", *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset* 2, No. 5 (2024): 146

<sup>10</sup> M. Yusuf Amar, "Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2022", *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 1, No. 4 (2023), 187

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan melalui beberapa indikator keuangan, di antaranya *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Gross Profit Margin* (GPM), dan *Net Profit Margin* (NPM). Melalui analisis ini, berbagai pihak dapat menilai kinerja perusahaan dan potensinya untuk berkembang di masa depan. *Return On Asset* (ROA) adalah sebuah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan. Sementara *Return On Equity* (ROE) mengukur sejauh mana bank dapat menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. *Gross Profit Margin* (GPM) menilai kemampuan bank dalam mengelola biaya produksi dan efisiensi operasional. Sementara *Net Profit Margin* (NPM) menggambarkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dan total pendapatan operasional. Berikut akan disajikan tren rasio profitabilitas pada BPRS di Tlatah Arek Jawa Timur:

**Grafik 1. 1 Tren Rasio Profitabilitas BPRS Tlatah Arek**



(Sumber: Laporan Keuangan, Ojk.go.id, diolah oleh peneliti)

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan perkembangan indikator profitabilitas (ROA, ROE, GPM, dan NPM). Secara umum, semua indikator



Nama BPRS	Periode	NPM		NPF	BOPO	FDR				
		Triwulan IV	0.01	↑	7.32	↓	152.92	↑	107.02	↑
BPRS Baktimakmur Indah	2022	Triwulan III	9.55		13.17		82.12		103.14	
		Triwulan IV	16.52	↑	13.01	↓	80.83	↓	94.48	↓
	2023	Triwulan I	3.72	↓	22.23	↑	84.75	↑	91.38	↓
		Triwulan II	8.04	↑	22.83	↑	81.09	↓	94.39	↑
		Triwulan III	3.00	↓	23.39	↑	84.78	↑	96.14	↑
		Triwulan IV	9.33	↑	21.77	↓	92.15	↑	100.40	↑
BPRS Annisa Mukti	2022	Triwulan III	14.70		20.67		73.89		82.21	
		Triwulan IV	15.39	↑	20.50	↓	84.62	↑	107.40	↑
	2023	Triwulan I	8.22	↓	21.29	↑	69.91	↓	142.03	↑
		Triwulan II	13.82	↑	20.99	↓	70.49	↑	120.34	↓
		Triwulan III	15.17	↑	20.60	↓	81.05	↑	75.58	↓
		Triwulan IV	17.21	↑	20.36	↓	80.40	↓	70.57	↓
BPRS Unawi Barokah	2022	Triwulan III	19.71		8.80		321.89		52.40	
		Triwulan IV	19.92	↑	13.27	↑	312.87	↓	47.75	↓
	2023	Triwulan I	-7.77	↓	4.36	↓	106.85	↓	115.83	↑
		Triwulan II	2.85	↑	4.74	↑	96.88	↓	102.94	↓
		Triwulan III	7.96	↑	6.05	↑	92.32	↓	211.00	↑
		Triwulan IV	12.13	↑	7.29	↑	87.95	↓	230.99	↑
BPRS Lantabur Tebuireng	2022	Triwulan III	36.94		8.97		68.87		70.97	
		Triwulan IV	33.75	↓	4.55	↓	69.28	↑	71.86	↑
	2023	Triwulan I	47.61	↑	8.95	↑	60.37	↓	71.56	↓
		Triwulan II	45.68	↓	14.37	↑	61.53	↑	77.19	↑
		Triwulan III	41.14	↓	14.69	↑	65.06	↑	75.44	↓
		Triwulan IV	37.68	↓	12.19	↓	68.44	↑	78.43	↑
BPRS Bhakti Haji	2022	Triwulan III	27.98		7.60		49.31		69.50	
		Triwulan IV	23.30	↓	11.07	↑	60.48	↑	75.36	↑
	2023	Triwulan I	21.76	↓	12.25	↑	53.85	↓	110.74	↑
		Triwulan II	15.03	↓	13.10	↑	62.66	↑	77.82	↓
		Triwulan III	31.26	↑	8.84	↓	59.06	↓	81.94	↑
		Triwulan IV	20.36	↓	7.15	↓	57.07	↓	87.97	↑
BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	2022	Triwulan III	17.56		6.65		76.19		154.38	
		Triwulan IV	19.86	↑	7.30	↑	75.68	↓	181.77	↑
	2023	Triwulan I	17.35	↓	7.07	↓	76.22	↑	89.59	↓
		Triwulan II	17.00	↓	8.38	↑	73.76	↓	88.96	↓
		Triwulan III	17.88	↑	10.27	↑	75.67	↑	108.20	↑
		Triwulan IV	19.47	↑	8.83	↓	80.80	↑	105.00	↓
BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah	2022	Triwulan III	26.99		0.54		69.25		99.21	
		Triwulan IV	29.89	↑	0.70	↑	70.41	↑	65.85	↓
	2023	Triwulan I	41.81	↑	0.62	↓	49.85	↓	75.80	↑
		Triwulan II	38.67	↓	0.51	↓	62.31	↑	83.64	↑
		Triwulan III	37.82	↓	0.44	↓	61.78	↓	83.70	↑
		Triwulan IV	36.03	↓	0.70	↑	63.30	↑	69.99	↓
BPRS Mojo Artho Mojokerto Perseroda	2022	Triwulan III	-1411.23		88.46		156.00		87.00	
		Triwulan IV	-1744.83	↓	90.21	↑	798.00	↑	87.00	
	2023	Triwulan I	6.27	↑	22.28	↓	96.00	↓	93.00	↑
		Triwulan II	76.08	↑	22.83	↑	30.00	↓	102.00	↑
		Triwulan III	71.84	↓	90.97	↑	35.00	↑	71.00	↓
		Triwulan IV	62.94	↓	36.70	↓	43.00	↑	44.00	↓
BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	2022	Triwulan III	10.42		6.37		90.14		96.95	
		Triwulan IV	9.47	↓	5.38	↓	90.66	↑	92.04	↓
	2023	Triwulan I	4.19	↓	5.64	↑	95.34	↑	96.50	↑
		Triwulan II	7.02	↑	8.59	↑	92.93	↓	104.14	↑
		Triwulan III	8.08	↑	10.88	↑	92.07	↓	150.41	↑

Nama BPRS	Periode	NPM		NPF		BOPO		FDR	
	Triwulan IV	9.43	↑	7.04	↓	90.87	↓	153.58	↑
BPRS Karya Mugi Sentosa	2022	Triwulan III		6.06		85.86		92.20	
		Triwulan IV	↓	4.18	↓	91.01	↑	87.23	↓
	2023	Triwulan I	↓	3.68	↓	103.74	↑	90.97	↑
		Triwulan II	↓	4.27	↑	95.33	↓	96.29	↑
		Triwulan III	↑	4.03	↓	93.13	↓	97.07	↑
		Triwulan IV	↑	2.93	↓	89.16	↓	92.47	↓
	<b>Total Permasalahan</b>				<b>30</b>		<b>20</b>		<b>27</b>

(Sumber: Laporan Keuangan, ojk.go.id, diolah oleh peneliti)

Keterangan:

- ↑ : mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya
- ↓ : mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya
- Warna merah : tidak sesuai dengan teori
- Warna hitam : sesuai dengan teori

Hubungan antara rasio-rasio keuangan dan *Net Profit Margin* (NPM) menggambarkan bagaimana kinerja operasional dan manajerial suatu bank memengaruhi profitabilitasnya. apabila *Non-Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan, maka akan meningkatkan NPM, karena berkurangnya pembiayaan bermasalah berarti bank dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan laba bersih. Sebaliknya, jika BOPO meningkat, maka NPM cenderung turun, karena tingginya biaya operasional mengurangi laba bersih yang dihasilkan. Apabila FDR meningkat, NPM biasanya akan naik, karena bank lebih efisien dalam memanfaatkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan, yang dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan.

Berdasarkan data tabel 1.6 dapat diketahui bahwa NPF merupakan indikator yang paling banyak tidak sesuai teori NPM. *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan mengalami keterlambatan atau tidak memenuhi batas kewajiban minimal yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*

(NPF) menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan bank syariah. Tingginya NPF menunjukkan adanya hambatan dalam pengembalian pembiayaan yang dapat mengganggu stabilitas kinerja bank. Kondisi ini berdampak pada menurunnya profitabilitas, salah satunya yang tercermin melalui *Net Profit Margin* (NPM).<sup>11</sup> Jenis pembiayaan ini cenderung sulit untuk diselesaikan secara penuh, bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat ditagih oleh pihak bank. Faktor utama penyebab NPF antara lain distribusi pembiayaan yang kurang tepat, baik dari segi penerima, jumlah, maupun jenis pembiayaan.<sup>12</sup>

Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir cukup kewalahan dalam menghadapi perlambatan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut berdampak pada sektor keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah, yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan stabilitas kinerja. Dalam menjaga keberlangsungan usahanya, bank syariah dituntut untuk meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan rasio keuangan yang sehat.<sup>13</sup> Salah satu faktor penting yang berpengaruh adalah tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Tingginya NPF dapat menurunkan laba karena mengurangi pendapatan bank, sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas yang salah satunya diukur dengan *Net Profit Margin* (NPM).

---

<sup>11</sup> Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *Jurnal Qawanin* 02, no. 2 (2018): 61.

<sup>12</sup> Purwando Suharyadi, *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, 2 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

<sup>13</sup> Faricha Lita Nabbila dan Zuraidah, "Analisis Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021," *Journal of Management and Sosial Sciences (JIMAS)* 1, no. 4 (2022): 65–70.

Beberapa penelitian telah mengkaji pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Net Profit Margin* (NPM). Salah satunya adalah Suhaima, penelitian yang dilakukan oleh Suhaima menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap NPM.<sup>14</sup> Sedangkan menurut penelitian Reina Nurjanah menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap NPM.<sup>15</sup>

Berdasarkan tabel 1.6 faktor *Non Performing Financing* (NPF) menjadi indikator yang mengalami banyak ketidaksesuaian dengan teori *Net Profit Margin* (NPM). Sehingga, peneliti memutuskan untuk menggunakan indikator NPM sebagai fokus penelitian. Pada tahun 2020-2021, Covid-19 memberikan dampak pada semua sektor, termasuk ekonomi dan perbankan. Sehingga, periode 2022-2024 menjadi menarik untuk diteliti. Periode ini mencerminkan bagaimana sektor perbankan, khususnya BPRS Tlatah Arek Jawa Timur beradaptasi dan membangun kembali stabilitas di tengah pemulihan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Net Profit Margin* (NPM) (Studi Pada BPRS Tlatah Arek Jawa Timur Periode 2022-2024)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> Suhaima, “Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Terhadap Net Profit Margin (NPM) (Studi Pada Bank Syariah Devisa Periode 2012-2018)” (IAIN Kediri, 2020).

<sup>15</sup> Reina Nurjanah, “Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPRS Al Ihsan Baleendah Periode Tahun 2012-2016,” (UIN Sunan Gunung Jati, 2018).

1. Bagaimana *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Tlatah Arek Jawa Timur tahun 2022-2024?
2. Bagaimana *Net Profit Margin* (NPM) BPRS di Tlatah Arek Jawa Timur tahun 2022-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Net Profit Margin* (NPM) BPRS di Tlatah Arek Jawa Timur tahun 2022-2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Tlatah Arek Jawa Timur tahun 2022-2024.
- 2 Untuk mengetahui *Net Profit Margin* (NPM) BPRS di Tlatah Arek Jawa Timur tahun 2022-2024.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Net Profit Margin* (NPM) BPRS di Tlatah Arek Jawa Timur tahun 2022-2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya wawasan serta literatur akademis mengenai pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada BPRS. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mendalami kinerja keuangan perbankan syariah, khususnya terkait profitabilitas dan manajemen pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi manajemen BPRS dalam merumuskan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih efektif, sehingga dapat menekan tingkat *Non-Performing Loan* (NPF) dan meningkatkan margin profitabilitas perusahaan.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya calon nasabah, dalam memahami aspek keuangan dan risiko di BPRS. Informasi ini dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih bijak saat memilih layanan perbankan syariah.

c. Untuk Pemerintah dan Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak terkait, seperti pemerintah dan otoritas pengawas, dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan pembiayaan di perbankan syariah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan syariah serta mendorong efisiensi dan profitabilitas sektor tersebut.

## E. Penelitian Terdahulu

1. “Pengaruh *Non-Performing Finance* (NPF) Terhadap *Net Profit Margin* (NPM) (Studi Pada Bank Syariah Devisa Periode 2012-2018)”, oleh Skripsi Suhaima, IAIN Kediri, 2020.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Suhaima, “Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Terhadap Net Profit Margin (NPM) (Studi Pada Bank Syariah Devisa Periode 2012-2018).”

Suhaima menemukan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Syariah Devisa Periode 2012-2018. Nilai rata-rata (*mean*) senilai 2,3731 yang digolongkan pada kriteria sehat, sedangkan nilai rata-rata (*mean*) NPM sebesar 8,2507 digolongkan pada kriteria baik. Dari hasil analisis diperoleh nilai Sig. 0,000 dan pada *model summary* diperoleh hasil bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 12,9%. Kesamaan penelitian Suhaima dengan penelitian ini terletak pada variabel X yaitu NPF, yang dianalisis pengaruhnya terhadap variabel Y, yaitu NPM. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jika penelitian Suhaima berfokus pada Bank Syariah Devisa dalam rentang waktu 2012-2018, penelitian ini lebih spesifik dengan fokus pada BPRS di Tlatah Arek, Jawa Timur, dalam periode 2022-2024.

2. "*Non-Performing Financing dan Financing to Deposit Ratio terhadap Net Profit Margin (NPM) Pada Perbankan Syariah Listing di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022*", oleh Muhammad Alfa Niam dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)*, Vol. 9 No.2, 2023.<sup>17</sup> Penelitian Muhammad Alfa Niam menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap NPM, dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai *R square* ( $R^2$ ) adalah 0,538, atau dengan kata lain pengaruh NPF terhadap NPM sebesar 53,8%. Sementara FDR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kesamaan penelitian Muhammad Alfa Niam

---

<sup>17</sup> Muhammad Alfa Niam, "Non Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Profit Margin (NPM) Pada Perbankan Syariah Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)* 9, no. 2 (2023): 238–250.

dengan penelitian ini adalah keduanya menganalisis pengaruh NPF terhadap NPM. Namun, berbeda pada variabel yang diteliti serta objek penelitian, pada penelitian Niam berfokus pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022.

3. “Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada PT. BPRS Al Ihsan Baleendah Periode Tahun 2012-2016”, oleh Reina Nurjanah, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPM, baik secara parsial maupun simultan, pada PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Nurjanah terletak pada analisis variabel NPF terhadap NPM. Namun, perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang diteliti dan cakupan objek penelitian. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup seluruh BPRS di Tlatah Arek, Jawa Timur, dalam periode 2022-2024.
4. “Pengaruh *Operatinal Efficiency Ratio* (OER) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Profit Margin* (NPM) di PT. Bank BNI Syari’ah Tbk Periode 2014-2016”, oleh Veni Septiani, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.<sup>19</sup> Penelitian Septiani menunjukkan NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPM baik secara parsial maupun simultan di PT. Bank BNI Syariah Tbk. Hasil penelitian

---

<sup>18</sup> Nurjanah, “Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada PT. BPRS Al Ihsan Baleendah Periode Tahun 2012-2016.”

<sup>19</sup> Veni Septiani, “Pengaruh *Operational Efficiency Ratio* (OER) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Net Profit Margin* (NPM) di PT. Bank BNI Syari’ah Tbk periode 2014-2016” (UIN Sunan Gunung Jati, 2018).

menunjukkan koefisien determinasi sebesar 36% dan sisanya 64% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesamaan penelitian Veni Septiani dengan penelitian ini terletak pada variabel NPF yang dianalisis terhadap NPM. Sedangkan perbedaannya yaitu jumlah variabel yang diteliti dan objek penelitian. Penelitian ini menganalisis seluruh BPRS di Tlatah Arek, Jawa Timur, pada Periode 2022-2024.

5. “Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profit Margin (NPM) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk”, oleh Risman Maulana, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.<sup>20</sup> Penelitian Risman Maulana menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPM baik secara parsial maupun simultan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi NPF terhadap NPM sebesar 2,90%. Kesamaan penelitian Risman Maulana dengan Penelitian ini adalah keduanya menganalisis pengaruh NPF terhadap NPM. Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada NPF sebagai variabel dependen dan menggunakan BPRS Tlatah Arek sebagai objek penelitiannya. Selain itu, objek dan tahun penelitian ini juga berbeda. Pada penelitian Risman dilakukan di Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2011-2015 sementara pada penelitian peneliti dilakukan di BPRS Tlatah Arek Jawa Timur pada tahun 2022-2024.

---

<sup>20</sup> Maulana, Risman “Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.”